

TESIS

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA
DI SULAWESI SELATAN**

***ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH
IN SOUTH SULAWESI***

**FADILAH
A032211014**



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA
DI SULAWESI SELATAN**

***ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH
IN SOUTH SULAWESI***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**FADILAH
A032211014**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA
DI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**FADILAH
A032211014**

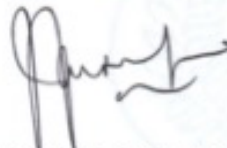
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal **04 September 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

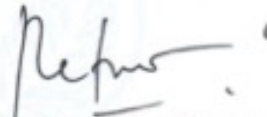
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Retno Fitrianti, SE., MSI., CWM®
NIP. 19770913 200212 2 002

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,



Dr. Indraswati Tri Abdireviane SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadilah

NIM : A032211014

Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul: **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota di Sulawesi Selatan”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/terbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar 18 September 2023

Yang menyatakan,



PRAKATA

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia. Berkat izin-Nya pulalah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul "ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA DI SULAWESI SELATAN". Tak lupa pula penulis menghanturkan shalawat teriring salam kepada junjungan nabi Muhammad SAW.

Gagasan yang melatarbelakangi tajuk permasalahan ini timbul dari fakta yang menunjukkan Kebijakan pembangunan yang terlalu terpusat juga menyebabkan keterbatasan dalam upaya pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, diperlukan strategi yang optimal dalam bentuk kerja sama antara pusat dan daerah. Pada studi ini ada tiga Kota yang menjadi penelitian yaitu Kota Makassar, Kota Pare-pare, dan Kota Palopo. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota di Sulawesi Selatan"

Tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna, sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal untuk mengakui sebagai sebuah karya yang belum layak baca. Akan tetapi sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik serta semangat dalam melahirkan karya-karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian, baik yang sengaja maupun yang tak sengaja membaca Tesis ini. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan Tesis ini, dan

hanya berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihaklah penulis mampu menyelesaikan Tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane. S.E., MA., CWM^R selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi pembangunan dan perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
4. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane. S.E., MA., CWM^R selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., MSi. CWM[®] selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini
5. Dosen penguji Ibu Prof. Dr. Nursini, S.E., MA. , Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D dan Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., MA Terima kasih atas saran, arahan dan ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat memperbaiki dengan baik Tesis ini
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada penulis selama menjalani perkuliahan
7. Seluruh pegawai dan staf Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu banyak hal selama ini mulai pengurusan administasi, fasilitas, dan lain sebagainya

8. Teman-teman seperjuangan “MEPP 2021 tanpa terkecuali” yang selalu memberi semangat, dukungan, doa, serta bantuan dalam hal apapun. Teman-teman di S1 Universitas Muslim Indonesia Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi angkatan 2015 terima kasih atas dukungan dan doa untuk saya bisa melanjutkan studi S2 di Kampus Merah.
9. Untuk Keluarga besar saya terkhususnya untuk orang tua saya tercinta Ibu, Ayah & Suami saya dan anak-anak saya Kenzo & Queenzy, terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, selalu setia membantu dalam hal materil dan moril selama menjalani proses perkuliahan
10. Untuk seluruh teman-teman diluar lingkungan kampus yang banyak membantu dalam hal apapun itu hingga Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik, terima kasih banyak.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga karya ini bermanfaat, khususnya bagi penulis.

Makassar, 19 September 2023

Fadilah

ABSTRAK

FADILAH. Analisis Efek Pertumbuhan Ekonomi Kota di Sulawesi Selatan
(Dibimbing oleh Indraswati T.A. Reviane dan Retno Fitrianti)

Penentuan pusat pertumbuhan di suatu wilayah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan regulasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pembangunan wilayah. Penentuan pusat pertumbuhan mempunyai fungsi untuk pemerataan pembangunan di semua wilayah, memudahkan kordinasi antar wilayah dan memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pengeluaran pemerintah, Investasi dan ekonomi kota. Penelitian ini menggunakan Path Analisis dengan perangkat lunak yang digunakan yaitu AMOS untuk melakukan pengolahan dan analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat efek pengeluaran pemerintah di tiga kota yaitu kota Makassar, Parepare, dan Palopo terhadap kabupaten di sekitarnya secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kota dan terdapat efek investasi kota Makassar terhadap kabupaten di sekitarnya secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi kota Makassar

Kata Kunci : efek ; Investasi; Pengeluaran Pemerintah; *path analysis*



ABSTRACT

FADILAH. *Analysis Of Economic Growth In South Sulawesi* (Supervised by Indraswati T.A. Reviane dan Retno Fitrianti).

Determining the center of growth in a region has a very important role in determining the direction of policies and regulations for the central and regional governments in carrying out regional development. Determination of growth centers has a function for equitable distribution of development in all regions, facilitating coordination between regions and maximizing the management of existing potential and natural resources. This study aims to determine the effect of government spending, investment and city economic growth to the surrounding districts through the city's economic growth. This study used to state with the software used, Eviews, to perform data processing and analysis. The results of this study indicate that there is no effect of government spending in three cities, namely the cities of Makassar, Parepare and Palopo to the surrounding districts indirectly through the city's economic growth and there is investment from the city of Makassar to the surrounding districts indirectly through the economic growth of the city of Makassar.

Keywords: Investment, Government effect, Spending, Eviews



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.1.2 Interaksi antar Wilayah.....	19
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah	14
2.1.4 Teori Investasi.....	18
2.2 Hubungan Antar Variabel	26
2.2.1 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Sebelumnya, dan Pertumbuhan Ekonomi Tetangga	26
2.2.2 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Sebelumnya, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota	28
2.3 Tinjauan Empiris	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	33
3.1 Kerangka Konseptual	33
3.2 Hipotesis	34

BAB IV METODE PENELITIAN	35
4.1 Jenis Penelitian.....	35
4.2 Sumber Data.....	35
4.3 Metode Pengumpulan Data	35
4.4 Metode Analisis Data.....	36
4.5 Definisi Operasional Variabel	38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
5.1.1 Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros	40
5.1.2 Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Barru	41
5.1.3 Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Luwu Utara	43
5.2 Deskripsi Data	45
5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	45
5.2.2 Pengeluaran Pemerintah	48
5.2.3 Investasi	50
5.3 Hasil Estimasi Analisis Model <i>Two Stage Least Square</i> (2SLS)	52
5.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
5.4.1 Interaksi Pemerintah Kota Makassar terhadap Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros	57
5.4.2 Interaksi Pemerintah Kota Parepare terhadap Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Barru.....	61
5.4.3 Interaksi Pemerintah Kota Palopo terhadap Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Luwu Utara	64
BAB VI PENUTUP.....	69
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan	2
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (dalam persen).....	3
Tabel 5. 1 Produk Domestik Regional Bruto 3 Wilayah di Sulawesi Selatan Tahun 2001 – 2021 (dalam trilliun rupiah).....	47
Tabel 5. 2 Pengeluaran Pemerintah 3 Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2002- 2021	48
Tabel 5. 3 Investasi 3 Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2002 - 2021.....	51
Tabel 5. 4 Hasil Estimasi Interaksi Kota Makassar (Z) Dengan Kabupaten Gowa (Y ₁) dan Kabupaten Maros (Y ₂)	53
Tabel 5. 5 Hasil Estimasi Interaksi Kota Parepare (Z) Dengan Kabupaten Sidrap (Y ₁) dan Kabupaten Barru (Y ₂).....	53
Tabel 5. 6 Hasil Estimasi Interaksi Kota Palopo (Z) Dengan Kabupaten Tana Toraja (Y ₁) dan Kabupaten Luwu Utara (Y ₂)	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

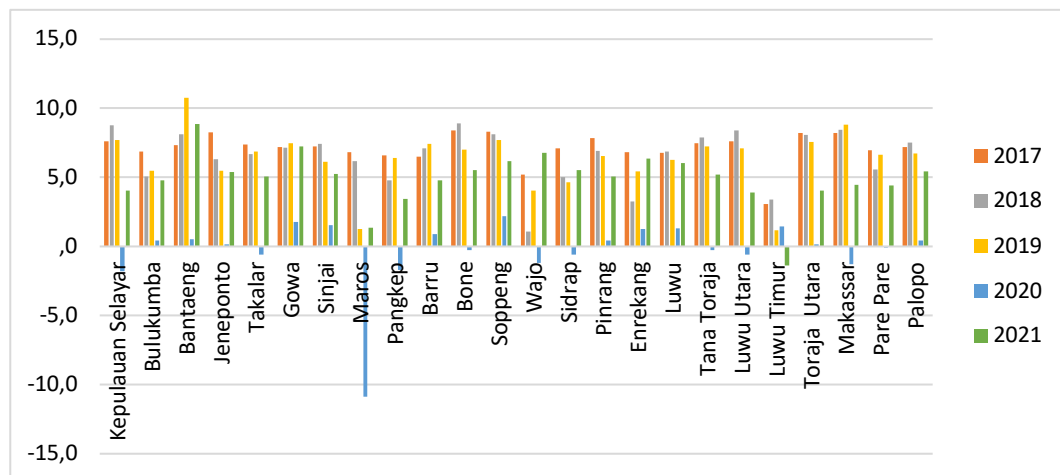
Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (Emalia dan Farida, 2018)

Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antarausaha-usaha tersebut (Tarigan, 2021).

Penentuan pusat pertumbuhan di suatu wilayah memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan regulasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pembangunan wilayah. Penentuan pusat pertumbuhan mempunyai fungsi untuk pemerataan pembangunan di semua wilayah, memudahkan kordinasi antar wilayah dan memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang ada. Pertumbuhan penduduk di Kawasan metropolitan naik secara signifikan.

Sulawesi Selatan merupakan provinsi terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi Ibu Kota Negara Indonesia Timur. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan

mengalami peningkatan kemudian lajunya menurun pada fase berikutnya (Oktareni, 2020). Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang kemudian lajunya menurun pada fase berikutnya, dikarenakan pada fase berikutnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat berpindah ke wilayah-wilayah ibu Kota, yaitu Makassar, Gowa, Maros, Takalar dan beberapa kawasan perkotaan lainnya yang menyebabkan sub-urbanisasi, yaitu proses terbentuknya permukiman- permukiman baru dan juga kawasan-kawasan industri di pinggiran wilayah perkotaan terutama sebagai akibat perpindahan penduduk Kota yang membutuhkan tempat bermukim dan untuk kegiatan industri (Rustiadi, 2011).



Sumber: BPS, 2021

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Berdasarkan grafik laporan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir yang dilihat berdasarkan PDRB harga konstan tiap Kabupaten/Kota dapat dilihat mengalami fluktuatif. Adapun pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis. Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dimulai pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun berikutnya hingga tahun 2022 usaha yang dilakukan oleh pemerintah

yaitu dengan optimisme pemulihan ekonomi global dan nasional, perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2022.

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (dalam persen)

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kepulauan Selayar	7,61	8,75	7,68	-1,78	4,02
Bulukumba	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76
Bantaeng	7,31	8,13	10,75	0,52	8,86
Jeneponto	8,25	6,29	5,47	0,16	5,4
Takalar	7,37	6,66	6,87	-0,61	5,05
Gowa	7,21	7,14	7,46	1,76	7,26
Sinjai	7,23	7,44	6,12	1,55	5,23
Maros	6,81	6,19	1,24	-10,87	1,36
Pangkep	6,6	4,77	6,41	-1,69	3,46
Barru	6,48	7,11	7,41	0,87	4,77
Bone	8,41	8,91	7,01	-0,25	5,53
Soppeng	8,29	8,11	7,69	2,19	6,15
Wajo	5,21	1,08	4,06	-1,17	6,77
Sidrap	7,09	5,02	4,65	-0,59	5,54
Pinrang	7,84	6,91	6,53	0,44	5,04
Enrekang	6,84	3,26	5,43	1,25	6,36
Luwu	6,79	6,86	6,26	1,3	6,03
Tana Toraja	7,47	7,89	7,22	-0,28	5,19
Luwu Utara	7,6	8,39	7,11	-0,59	3,9
Luwu Timur	3,07	3,39	1,17	1,46	-1,39
Toraja Utara	8,22	8,07	7,56	0,17	4,05
Makassar	8,2	8,42	8,79	-1,27	4,47
Pare Pare	6,98	5,58	6,65	-0,08	4,41
Palopo	7,17	7,52	6,75	0,45	5,41

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menunjukkan nilai dari pertumbuhan ekonomi pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jika dilihat bahwa nilai tertinggi masih diduduki oleh Kota Makassar. Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala

internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia. Penerapan konsep pembangunan Kota terintegrasi tentunya memberi dampak perubahan yang besar pada masyarakat lokal terutama berada pada kawasan yang mengalami perubahan fungsi ruang tersebut. Lebih jelasnya tren pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa dan sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan. Salah satu tujuan dari pembukaan Penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah mewujudkan kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia.

Bukan hanya Kawasan Perkotaan Mamminasata terdapat juga Kota Parepare dan Kota Palopo dan sekitarnya yang seharusnya mampu memberikan spread effect terhadap wilayah di sekitarnya. Spread effect didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan menyebar efek yang menguntungkan bagi daerah-daerah di sekitar wilayah tersebut.

Jika dilihat dari Tabel 1.1 bahwa nilai pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang diketahui bertetangga dengan Kota Palopo. Hal yang sama juga terlihat

di Kota Parepare dimana pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada Kabupaten Sidrap. Dari data tersebut sudah membuktikan bahwa kawasan perkotaan belum mampu memberikan spread effect terhadap wilayah di sekitarnya.

Salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan perkotaan adalah kurangnya interaksi dalam pengembangan wilayah di dalam ruang antara wilayah Kota (kawasan inti) dan Kabupaten hinterland yang masih belum berjalan dengan baik. Hal lainnya menunjukkan kurang terdapatnya interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lain yang menyebabkan terjadinya permasalahan interaksi keruangan antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Pemanfaatan perkembangan wilayah perkotaan (metropolitan) sangat dibutuhkan dalam mendukung tersebarnya potensi perkotaan ke wilayah lainnya sehingga memerlukan arahan pengembangan wilayah melalui interaksi keruangan antar Kabupaten-Kota atau yang biasa disebut dengan metropolitan.

Gejala tumpang tindih program dan kebijakan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat di daerah menunjukkan ketidakjelasan peranan dari badan-badan pemerintah. Program-program nasional mendominasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Hubungan para pelaksana di daerah secara vertikal dengan pemerintah pusat, ternyata secara administratif lebih dominan dibandingkan dengan hubungan horizontal terhadap pemerintah desa. Kekaburan di atas juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa seorang gubernur selain berperan sebagai perpanjangan tangan presiden dan pemerintah pusat di daerah, juga sebagai kepala dari pemerintah daerah yang bersangkutan (MacAndrews dan Amal, 2000).

Kesenjangan yang terjadi antar daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah Sulawesi Selatan. Kesenjangan terjadi antara Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*-nya maupun antar daerah Kabupaten/Kota *hinterland* itu sendiri. Pemerintah Sulawesi Selatan telah membentuk pemasaran dan manajemen regional untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah tersebut secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mendorong terjadinya kerjasama antar daerah secara lebih efektif, maka diperlukan suatu kajian potensi masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Selatan dan keterkaitan antar sektor ekonomi serta keterkaitan antar daerah sehingga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi regional.

Keterkaitan ekonomi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian suatu daerah dengan lingkungan sekitarnya dan eksternalitas aglomerasi dipandang sebagai faktor penentu yang penting dalam konsentrasi geografis kegiatan ekonomi di daerah perkotaan. Kaitan intrasektoral (kaitan antar perusahaan dalam sektor yang sama) dan kaitan antar sektor adalah suatu cara untuk melihat eksternalitas aglomerasi, baik yang dipicu oleh input (pemasok) ataupun output (pelanggan) (Kuncoro, 2002).

Menurut Bintarto (1984) kotadesasi yang terjadi di wilayah Indonesia yang memerlukan adanya pengembangan wilayah melalui interaksi keruangan antar Kabupaten-Kota. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik ruang sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala, kenampakan dan permasalahan baru (Wahyuni, 2020).

Interaksi antar ruang pasti terjadi di semua daerah, daya dorong untuk memenuhi kebutuhan mendasari adanya hubungan tersebut. Fenomena

keterkaitan dalam berinteraksi dipicu oleh faktor alam, manusia dan kondisi sosial budaya. Bentuk interaksi antar ruang seperti mobilitas penduduk secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi keadaan wilayah (Hendrawati, 2018). Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterahkan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi (Basitias, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Stokes et al., (2022) secara umum, pengeluaran layanan otoritas lokal di Inggris meliputi kesehatan masyarakat yang mencakup perawatan sosial, jalan raya dan transportasi, perumahan, budaya, dan pengeluaran lingkungan. Adapun investasi diperkirakan tumbuh kuat seiring dengan terjaganya tingkat keyakinan investor dan berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah serta swasta. Perbaikan tersebut mendukung kinerja lapangan usaha utama Sulawesi Selatan, antara lain perdagangan dan industri pengolahan, untuk tumbuh lebih tinggi.

Dalam pembangunan regional, investasi juga memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan agar menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. Investasi dapat mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan teknologi dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena terbukanya lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga ekonomi regional meningkat.

Besarnya peran Provinsi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian wilayah di KTI didukung oleh besarnya peran wilayah-wilayah di dalamnya, baik

Kabupaten/Kota. Wilayah-wilayah perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan (core region) berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan dan pemukiman, sedangkan wilayah disekelilingnya (hinterland) berfungsi sebagai pemasok barang dan jasa ke wilayah inti, bahkan keluar daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Melalui peraturan presiden (Perpres) No 55 tahun 2011 diresmikan kawasan metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Mamminasata yang mencakup Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Sungguminasa (Kabupaten Gowa) dan beberapa kawasan perkotaan yang ada di Sulawesi Selatan yang diharapkan akan menjadi proyek percontohan pengembangan tata ruang terpadu di Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Dengan kata lain, untuk empat Kabupaten/Kota yang ada ini, diharapkan akan terjadi sinergitas ekonomi sehingga mampu mendorong daerah lainnya yang ada disekitarnya (Oktareni, 2020).

Kebijakan pembangunan yang terlalu terpusat juga menyebabkan keterbatasan dalam upaya pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, diperlukan strategi yang optimal dalam bentuk kerja sama antara pusat dan daerah. Pada studi ini ada tiga Kota yang menjadi penelitian yaitu Kota Makassar, Kota Pare-pare, dan Kota Palopo. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul "Analisis Efek Pertumbuhan Ekonomi Kota di Sulawesi Selatan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti ingin mencoba menganalisis permasalahan sebagaimana berikut :

1. Apakah terdapat efek pengeluaran pemerintah Kota terhadap Kabupaten sekitarnya melalui pertumbuhan ekonomi Kota?
2. Apakah terdapat efek investasi Kota terhadap Kabupaten sekitarnya melalui pertumbuhan ekonomi Kota?
3. Apakah terdapat efek pertumbuhan ekonomi Kota tahun sebelumnya terhadap Kabupaten sekitarnya melalui pertumbuhan ekonomi Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengeluaran pemerintah Kota terhadap Kabupaten sekitarnya melalui pertumbuhan ekonomi Kota.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh investasi Kota terhadap Kabupaten sekitarnya melalui pertumbuhan ekonomi Kota.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi Kota tahun sebelumnya terhadap Kabupaten sekitarnya melalui pertumbuhan ekonomi Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut perencanaan pembangunan.

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan

perbandingan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah yang sama dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup berfungsi sebagai pembatas supaya penelitian tetap berada pada konteks pembahasan. Strategi interaksi pemerintahan ditunjukkan dengan adanya keterkaitan antar wilayah. Ada beberapa jenis keterkaitan tersebut antara lain keterkaitan transportasi, komunikasi, sumber daya alam, ekonomi, sosial, pelayanan umum, dan instutisional. Dalam penelitian ini akan dianalisis bentuk interaksi pemerintahan daerah Kota di Sulawesi Selatan.

Penelitian-penelitian mengenai pertumbuhan perkotaan sebagian besar hanya memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan pada internal Kota saja, sedangkan peran Kota lain terhadap Kota tersebut kurang diperhatikan pengaruhnya. Untuk itu penelitian ini mencoba melihat seberapa besar pengaruh interaksi spasial terhadap pertumbuhan fisik Kota (perubahan luas area terbangun) dibandingkan dengan faktor pertumbuhan perkotaan yang berasal dari internal Kota meliputi faktor sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan (Oktareni, 2020).

Perbandingan potensi interaksi antar wilayah dapat diterapkan jika kondisi wilayah-wilayah yang dibandingkan memenuhi persyaratan tertentu yaitu sebagai berikut: a) Kesamaan dalam hal sosial-ekonomi dan sosial- budaya antar wilayah; b) Kesamaan topografi antar wilayah dan c) Kesamaan sarana dan prasarana yang menghubungkan antar wilayah. Penelitian ini akan mencakup seluruh Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan untuk membandingkan sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan. Dalam penelitian ini juga dibatasi oleh waktu yang akan disesuaikan ketika terbitnya surat penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai suatu proses kenaikan *output* tenaga kerja dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output tenaga kerja dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi juga bisa dikatakan sebagai suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu prekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu prekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan sendiri.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah juga bisa berbeda atau bervariasi dari satu sama lain. Ini telah membuat beberapa wilayah dapat dikenal sebagai wilayah yang tumbuh cepat, wilayah yang tumbuh lambat, sedangkan wilayah lain memiliki pertumbuhan yang stagnan. Variasi tingkat pertumbuhan antar wilayah juga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jumlah dan kapasitas penduduk, potensi sumber daya alam, ketersediaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas, perbedaan karakteristik wilayah, pengembangan kemampuan suatu daerah, kemudahan pengembangan, dan lain-lain.

Negara kaya maupun miskin yang menganut sistem kapitalis, sosial mapun campuran, semuanya sangat mendambakan pertumbuhan ekonomi. Berhasil tidaknya program program pembangunan di negara-negara berkembang sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan

ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah .

Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dalam hal ini ada tiga aspek yang perlu.

Menurut BPS (2021), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah (BPS, 2021).

Schumpeter mengartikan pertumbuhan ekonomi (growth) sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah factor produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Menurut Karjoredjo, pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi, termaksud pembangunan daerah merupakan proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka

panjang. Pendapatan masyarakat di sini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan masyarakat perkapita orang (Karjoredjo, 1999: 35).

Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa Neo Klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuanteknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

Dalam teori ini disebutkan bahwa rasio output capital atau rasio modal produksi dapat dengan mudah berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi antara pemakai modal dan tenaga kerja. Apabila modal yang digunakan lebih besar, maka lebih kecil tenaga kerja yang diperlukan. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan lebih terbatas maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Kondisi semacam ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini (Arsyad, 1992: 56).

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) merupakan model ekonomi dengan pendekatan umum dimana bebas mengabaikan beberapa aspek penting dari macroeconomics, seperti fluktuasi jangka pendek dalam ketenagakerjaan, pertumbuhan populasi, dan tabungan. Model pertumbuhan Solow merupakan model pertumbuhan yang mengasumsikan bahwa perkembangan teknologi adalah exogenous. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain: tingkat depresiasi dianggap konstan, tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal, tidak ada sektor pemerintah, tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) dianggap konstan serta seluruh

penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah pekerja (Pratama dan Manurung, 2008: 141).

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, government expenditure atau government purchase meliputi semua pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya (Ilyas, 2001).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Klasifikasi Belanja Pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sembilan fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Kesembilan fungsi tersebut dikelompokkan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

1) Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan

Pengeluaran pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Widodo, 2011).

Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk

bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan struktur anggaran yang dipakai sekarang, maka anggaran pemerintah daerah dinamakan anggaran terpilih. Struktur anggaran pemerintah, dalam sistem anggaran di Indonesia dikenal dua macam pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk operasionalisasi pemerintah seperti halnya untuk pembayaran gaji pegawai dan lainnya, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi pemerintah, diantaranya investasi disektor pendidikan dan kesehatan (publik) (Widodo, 2011).

Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan anggaran adalah suatu tindakan penyeimbangan berbagai kebutuhan.

Kebutuhan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan di sektor

public tersebut pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri. Sehingga dengan otonomi daerah pemerintah daerah akan semakin mampu mencukupi kebutuhan pembangunannya. Selain memasukkan indeks kesehatan, perhitungan IPM juga memasukkan indeks pendidikan. Indeks pendidikan berbeda dengan indeks kesehatan, karena di dalam indeks pendidikan mengakomodir dua indikator komponen prestasi, yaitu: indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks melek huruf dihitung berdasarkan perubahan angka melek huruf, sedangkan indeks rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan angka rata-rata lama sekolah.

2) Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan

Dalam UUD 1945 disebutkan kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, sehingga pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitasi kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan nasional telah disebutkan setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pegeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasarrakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Prioritas kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (Tjiptoherijanto, 2000).

Melihat mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sumber daya

manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut memengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, atau pun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah indikator harapan hidup (indeks kesehatan) (Tjiptoherijanto, 2000).

3) Pengeluaran Pemerintah bidang Perlindungan Soasial

Perlindungan sosial merupakan sebuah aspek yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamankan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Menurut (Suharto, 2014) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Iping, 2020).

Target belanja untuk perlindungan sosial dalam APBN kian meningkat tiap tahunnya, bahkan tahun ini dialokasikan hingga 12% dari total belanja pemerintah pusat. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program-program

pemerintah seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Indonesia Pintar, dan masih ada beberapa program lagi yang akan diinisiasi. Total anggaran yang masing-masing mencapai nominal trilyunan ini mampu mencakup jutaan warga Indonesia. Dengan adanya banyak program perlindungan sosial ini, pemerintah bermaksud untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang dapat menunjang IPM di Indonesia melalui salah satu dari komponen pengukur utamanya, yaitu keadaan ekonomi yang dilihat dari kemampuan daya belinya (Hidarini, 2020).

2.1.3 Teori Investasi

Investasi berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu komponen dari Produk Domestik Bruto. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential dan investasi residential. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.

Investasi menurut Pujoalwanto (2014) yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Pujoalwanto, 2014).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dimana Indonesia mengalami penekanan jumlah penduduk yang makin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat karena belum seimbangny kegiatan ekonomi khususnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga menciptakan permasalahan pokok yaitu pengangguran.

Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri-industri turutan di wilayah sekitarnya. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi. Selain itu, investasi juga akan memperbesar pemerolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor (Sihombing, 2012).

2.1.4 Interaksi antar Wilayah

Menurut Roucek (1963) interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar dan lain-lain. Interaksi pemerintah adalah hubungan timbal balik antara dua pemerintahan atau lebih yang menimbulkan aktivitas baru untuk wilayahnya. Wilayah-wilayah yang saling berinteraksi akan membentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut

dengan zona interaksi. Interaksi pemerintahan antar suatu Kabupaten atau Kota akan dipengaruhi oleh interaksi antar wilayah.

Interaksi antar wilayah merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan dinamika yang terjadi di suatu wilayah karena aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia di wilayah tersebut. Interaksi dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Interaksi spasial ditunjukkan dengan bertukarnya berbagai elemen regional dalam aspek kegiatan produksi dan kegiatan sehari-hari. Elemen tersebut meliputi materi, energi, populasi, dan informasi.

Faktor yang memengaruhi interaksi pemerintahan untuk menimbulkan aktivitas baru untuk wilayahnya yaitu :

- a. Adanya wilayah yang saling melengkapi (*Regional Complimentary*) Hal ini dapat terjadi karena setiap wilayah memiliki sumber daya alam dan kebutuhan yang berbeda-beda.
- b. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang (*Spatial Transfer Ability*) Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang dipengaruhi oleh jarak mutlak dan jarak relatif antar wilayah, dan kelancaran sarana transportasi antar wilayah.
- c. Adanya kesempatan berinvestasi (*Intervening Opportunity*) Hubungan antar wilayah dapat diperlemah oleh adanya alternatif pengganti sumber daya yang dibutuhkan wilayah lain atau pihak ketiga.

Adapun menurut Bintarto (1984) interaksi antar wilayah merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan dinamika yang terjadi di suatu wilayah karena aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia di wilayah tersebut. Interaksi

dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru.

Interaksi antara dua tempat dipengaruhi oleh besarnya aktivitas sosial dan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat, jarak dan besarnya pengaruh jarak. Model gravitasi yang digunakan untuk mengukur besaran interaksi spasial merupakan model turunan dari Gravitasi Newton yang kemudian diterapkan oleh W.J. Reilly (1929), seorang Ahli Geografi untuk mengukur kekuatan interaksi spasial antara dua wilayah atau lebih.

Bentuk-bentuk interaksi wilayah ditunjukkan dengan adanya keterkaitan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa jenis keterkaitan tersebut, antara lain:

- a. Keterkaitan transportasi yang meliputi jalan, rel, sungai transportasi udara, termasuk kondisi infrastruktur dan armadanya serta pola penggunaan, pemilikan dan pelayanan yang ditawarkan.
- b. Keterkaitan komunikasi yang meliputi telepon, telegram, surat kabar dan sosial media.
- c. Keterkaitan sumber daya alam yang meliputi jaringan drainase, jaringan sungai, arah angin, jaringan irigasi.
- d. Keterkaitan ekonomi meliputi rantai aliran pemasaran, aliran barang, keterkaitan produksi, pola belanja konsumen, aliran modal, sistem keuangan formal dan informal, komuter, migrasi, migrasi musiman.
- e. Keterkaitan sosial meliputi kelompok etnis dan agama, pola kekerabatan, keterkaitan antar kelas masyarakat.

- f. Keterkaitan pelayanan umum meliputi jaringan pendidikan dan pelatihan, jaringan utilitas, sistem diseminasi penelitian dan informasi khusus pelayanan transportasi pribadi, keterkaitan pelayanan kesehatan.
- g. Keterkaitan institusional meliputi keterkaitan pemerintah, sistem anggaran sesuai tingkatan pemerintah, pola kewenangan.

1) Faktor-faktor yang Memengaruhi Interaksi antar Wilayah

Menurut Myrdal (1957), pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu bergantung pada lokasi dari sumberdaya alam dan keuntungan-keuntungan lokasi lainnya. Pertumbuhan ini akan terjadi pada daerah belakangnya melalui melalui efek kumulatif yaitu efek sebar (*spread effect*) dan efek serap (*backwash effect*). Prinsip pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh adanya industri propulsive tertentu, cenderung hanya akan menarik modal dari daerah sekitarnya, karena keuntungan lokasi pada wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan *backwash effect* akan menjadi lebih kuat dari *spread effect* yang ditandai dengan adanya penyerapan ekonomi wilayah sekitarnya ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebut. Apabila tidak ada kebijaksanaan intervensi dari suatu mekanisme pasar maka pertumbuhan ekonomi ini akan menimbulkan pertumbuhan wilayah yang timpang.

Robertson dan Boudeville (1967) menyatakan bahwa setiap wilayah mempunyai perbedaan struktur ekonomi. Perbedaan ini dipengaruhi antara lain oleh adanya perbedaan latar belakang historis dan potensi sumber daya manusia pada wilayah-wilayah tersebut. Untuk dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi dari pusat ke daerah belakangnya, maka Boudville mengusulkan perlu dilakukan pemilihan lokasi pusat atau kutub pertumbuhan yang dapat mendorong efek kumulatif kegiatan ekonomi dan menyebarkannya ke wilayah belakangnya.

Adapun menurut Friedmann (1966), pembangunan merupakan suatu proses integrasi sosial dan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya berbagai inovasi pada daerah inti (*core area*) yang kemudian menyebar pada daerah belakangnya (*periphery*). Pertumbuhan tersebut terjadi secara kumulatif dalam lingkup sosial dari Kota-Kota atau wilayah-wilayah, dimana terdapat berbagai kemudahan dalam sistem komunikasi dan informasi, kemampuan memecahkan suatu masalah sosial dan sebagainya.

Wilayah yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi dan memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah tersebut, sehingga tersebut dapat dikategorikan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan (Matondang, 2018). Menurut Hardati (2016) berpendapat bahwa tingkat perkembangan wilayah seharusnya diikuti dengan bertambahnya jumlah fasilitas pendukung, dengan kata lain fasilitas pendukung adalah salah satu tolak ukur wilayah tersebut dikatakan sebagai wilayah yang berkembang, hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas yang ada di suatu wilayah sehingga dapat ditentukan hirarki wilayah dan pusat pertumbuhan.

Kajian pusat pertumbuhan wilayah yang terjadi Kabupaten Lamongan dapat dijadikan sebagai strategi pengembangan wilayah dengan tujuan pemerataan kesejahteraan dengan menentukan wilayah yang menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi serta pelayanan publik yang dapat memengaruhi wilayahnya untuk berkembang. Perekonomian merupakan inti dari pemusatan pertumbuhan pada suatu wilayah, seperti halnya perindustrian akan cenderung untuk mengelompok pada lokasi tertentu, keberadaan industri akan memengaruhi pasar dan hal itu juga

akan berpengaruh pada sumber utama pendapatan wilayah (Menghinello et al., 2010).

Wilayah-wilayah yang lebih berkembang pada dasarnya mempunyai tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang belum berkembang, interaksi itu sendiri karena adanya aksestabilitas antar wilayah lain (Matondang, 2018). Faktor lain yang mendorong perkembangan wilayah adalah kedekatan lokasi atau suatu wilayah dengan pusat ekonomi dan pemerintahan umumnya akan lebih terdorong untuk berkembang, wilayah dengan lokasi strategis akan berpotensi menjadi penyangga bagi wilayah pusat (Muta'ali, 2015). Ada tiga cara dalam mengidentifikasi keterkaitan antara wilayah dalam suatu daerah, antara lain:

Teori ekonomi basis mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan sektor yang menjadi basis pada suatu wilayah. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep-konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas, nodalitas dan konsep administrasi. Sektor basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional.

Spatial Transfer of Ability adalah kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, gagasan dan informasi atau pun proses pemindahan barang (Rahayu dan Wibowo, 2017). Faktor ini sangat berhubungan dengan bentuk interaksi ini antara lain:

- a. Jarak mutlak dan relatif antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

- b. Biaya angkutan atau biaya transportasi yang memindahkan manusia, barang, gagasan dan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya.
- c. Kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antarwilayah, seperti kondisi jalan, relief wilayah yang dilewati, dan jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi.

Kesempatan antara (*intervening opportunity*) dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat memberikan kesempatan timbulnya interaksi antar wilayah. Secara potensial antara wilayah A dan B sangat mungkin terjalin hubungan timbal balik, sebab wilayah A kelebihan sumber daya X dan kekurangan sumber daya Y, sedangkan keadaan di wilayah B sebaliknya. Namun, karena kebutuhan masing-masing wilayah itu secara langsung telah dipenuhi oleh daerah C maka interaksi antara wilayah A dan B jadi melemah.

2) Potensi Interaksi antar Wilayah

Menurut Tarigan (2021) menyatakan bahwa potensi dalam melakukan interaksi antar wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat permanen. Untuk mencapai hal ini maka pemanfaatan aset tersebut haruslah direncanakan secara menyeluruh dengan cermat. Ia juga mengemukakan bahwa banyak di antara sumberdaya tersebut selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbarui. Kalaupun ada yang masih mungkin untuk diperbarui, memerlukan waktu yang cukup lama dan biayanya cukup besar.

Penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang baik dan bijaksana dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia. Sumberdaya alam banyak

dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan, salah satunya berupa lahan. Penggunaan lahan ini sangat erat kaitannya dalam pengembangan wilayah. Efisiensi dan pengelolaan penggunaan lahan yang tepat sangat penting bagi keberlanjutan kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan sifatnya yang jamak, sumberdaya memiliki dimensi jumlah, waktu, kualitas dan tempat. Dimensi – dimensi ini erat kaitannya dengan stock dan flow sumberdaya tersebut yang nantinya memengaruhi jumlah permintaan dan penawaran pada sumberdaya itu sendiri. Hal itu dapat mengubah nilai sumberdaya tersebut karena adanya faktor kelangkaan dimana sebagian besar sumberdaya yang ada bersifat terbatas. Adanya keterbatasan sumberdaya menuntut efisiensi penggunaan dan pemanfaatan yang optimal.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Sebelumnya, dan Pertumbuhan Ekonomi Tetangga

Pengeluaran Pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada pajak yang diharapkan akan diterima, pertimbangan politik, dan permasalahan yang dihadapi (Samuelson dan Nordhaus, 2011).

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua dalam tingkat pengeluaran agregat. Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi

barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal (Sukirno, 2016).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2016). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2016). Todaro dan Smith (2012) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi.

Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari pada lingkup pemerintah daerah tersebut melainkan pada daerah yang bertetangga dalam suatu wilayah tersebut. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.2.2 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Sebelumnya, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota

Guritno Mangkoesobroto (2012) mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan investasi sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara.

Investasi dapat juga dikatakan sebagai pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Dornbusch dan Fischer (2012) berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang.

Investasi yang memadai juga akan berdampak positif terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya investasi maka modal akan tersedia, semakin banyak investor yang menanamkan modalnya tentu akan meningkat produksi yang nantinya akan menghasilkan output yang tinggi serta akan menambahkan pendapatan daerah dari pajakyang di bayarkan oleh pemerintah.

Sehingga dari hal tersebut yang mampu dilakukan pemerintah agar dapat mengalokasikan pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi tertentu apabila terjadi ketimpangan. Perbedaan ini disebabkan alokasi belanja pemerintah yang dikeluarkan melalui belanja publik kurang menyentuh masyarakat. Idealnya, distribusi dana ke dalam pos-pos anggaran harus dapat memenuhi kebutuhan

publik terhadap sarana dan prasarana umum. Pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk Kabupaten/Kota sangat berfluktuasi untuk setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan di suatu Kabupaten/Kota disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi di daerah. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi.

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Emalia dan Farida (2018) dengan judul Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung. Alat analisis yang digunakan adalah tipologi klassen, skalogram, indeks sentralitas, skala ordinal, arcGIS dan indeks gravitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga daerah di Provinsi Lampung yang maju dan berkembang pesat yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Selatan menjadi pertumbuhan kawasan kutub di Provinsi Lampung dengan hinterland yang memiliki interaksi tertinggi adalah Pesawaran Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung.

Penelitian yang dilakukan oleh Fudhail et al., (2021) dengan judul Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Analisis Interaksi Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan model analisis gravitasi dan analisis skalogram. Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas menunjukkan dari tahun 2009 ke tahun 2018 daerah pedalaman yang berinteraksi kuat dengan Kota Surabaya seperti Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Bangkalan. Implikasi kebijakan bidangnya peningkatan kerja sama antar wilayah baik dalam ekonomi maupun sosial antara wilayah menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterlandnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugestiadi dan Basuki (2020) berjudul "Pengaruh Interaksi Spasial Antara Kota Surakarta Dengan Kawasan Perkotaan

Sekitarnya Terhadap Pertumbuhan Perkotaan" bertujuan untuk menganalisis interaksi spasial antara Kota Surakarta dan kawasan perkotaan di sekitarnya dalam Kawasan Metropolitan Surakarta, serta mengidentifikasi pengaruh interaksi spasial tersebut terhadap pertumbuhan kota di Kawasan Metropolitan Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati perubahan luas lahan terbangun dari tahun 2002 hingga 2017 di Kota Surakarta dan kawasan perkotaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi spasial antara kawasan perkotaan di Kawasan Metropolitan Surakarta dan Kota Surakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Variabel interaksi spasial juga terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Wilayah Perkotaan Boyolali, Wilayah Perkotaan Karanganyar, dan Wilayah Kota Sukoharjo.

Penelitian yang dilakukan oleh Winarto (2021) dengan judul Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Provinsi Jawa Tengah. Teknik dalam penelitian ini menggunakan analisis skalogram dan analisis model gravitasi. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas pada tahun 2019 dengan menggunakan 30 jenis fasilitas, menghasilkan 6 hirarki daerah berdasarkan ketersediaan jenis fasilitas di setiap Kabupaten/Kota. Sedangkan hasil dari analisis gravitasi menunjukkan Kota Semarang sebagai salah satu daerah pusat pertumbuhan pada tahun 2019 memiliki interaksi kuat dengan Kabupaten Semarang, Kab. Demak, Kab. Kendal, dan Kab. Grobogan.

Penelitian yang dilakukan oleh Costa et al., (2015) dengan judul *Interactions in Local Governments' Spending Decisions: Evidence from Portugal*. Alat analisis yang digunakan adalah bobot spasial antarwilayah. Hasil menunjukkan bahwa keputusan belanja pemerintah daerah secara signifikan dan positif, dipengaruhi oleh Kota yang saling bertetangga. Upaya untuk mengidentifikasi sumber interaksi

memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa itu adalah karena limbah yang memerlukan koordinasi dalam pengeluaran dan menunjukkan perilaku untuk menarik perhatian para rumah tangga dan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Najmuddin dan Rizkiyani (2022) dengan judul penelitian *Government Spending by Function and Economic Growth in Maluku Utara: I-O Table and Panel Data Regression Analysis*. Penelitian ini menggunakan analisis dampak tabel I-O dan analisis regresi data panel. Berdasarkan analisis dampak tabel I-O, belanja modal memiliki dampak output dan nilai tambah terbesar pada sektor konstruksi. Sementara itu, konsumsi pemerintah dan total pengeluaran pemerintah berdampak paling besar pada sektor Administrasi Pemerintah. Kemudian dari hasil analisis regresi data panel terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu pengeluaran menurut fungsi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun terdapat anomali pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian dengan pengaruh negatif sebesar 0,003190. Hal ini menunjukkan pos-pos yang dialokasikan untuk belanja pemerintah menurut fungsi ekonomi di Maluku Utara tidak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusri (2022) dengan judul *Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, and Education? Evidence from Aceh, Indonesia*. Metode penelitian yang dilakukan yaitu *Synthetic Control Method (SCM)*. Penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses ke sanitasi yang aman dan meningkatkan rasio partisipasi murni sekolah menengah atas.

Penelitian yang dilakukan oleh Anichin et al., (2021) dengan judul *Improving Interaction Between Public Authorities and Business Structures in the Region*.

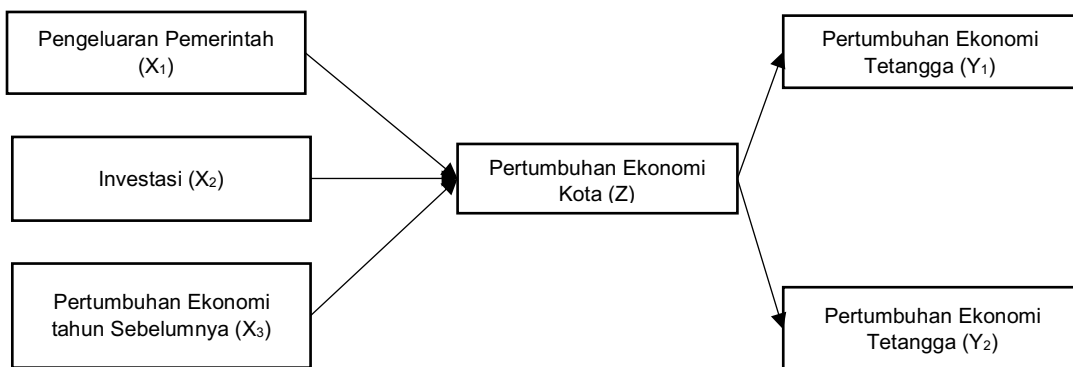
Penelitian menggunakan kuantitatif untuk keberlanjutan pembangunan daerah. Penelitian ini menganalisis kemungkinan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan bisnis, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menunjukkan peningkatan interaksi otoritas publik dan struktur bisnis harus menjadi pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kemampuan wilayah untuk memperluas reproduksi sistem sosioekologis dan ekonominya sendiri ditentukan oleh swasembada anggaran. Pada gilirannya, swasembada anggaran ditentukan oleh isi interaksi antara pemerintah dan swasta.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan di tinjauan pustaka maka dapat dirumuskan suatu kerangka konsep penelitian yang diuraikan secara singkat sebagai berikut: interaksi pemerintah antar Kota sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mempercepat pembangunan suatu wilayah adalah pengembangan wilayah dengan menetapkan pusat pertumbuhan yang didukung oleh pemerintah (Emalia et al., 2019). Faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antar Kota yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Pengeluaran pemerintah, investasi dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian

3.2 Hipotesis

Dalam penelitian ini, diajukan hipotesis bahwa:

1. Diduga terdapat efek pengeluaran pemerintah Kota pertumbuhan ekonomi Kota.
2. Diduga terdapat efek investasi Kota terhadap pertumbuhan ekonomi Kota.
3. Diduga terdapat efek pertumbuhan ekonomi Kota tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota.
4. Diduga terdapat efek pertumbuhan ekonomi Kota terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten sekitarnya